

# PERAN AKTOR POLITIK LOKAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Sandy Pardo Edma

NPP 32.0175

Asdaf Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : sandypardonst@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The main problem underlying this research is how the role of local political actors in the development of road infrastructure in Rokan Hulu Regency, considering that the status of provincial roads to national roads has not been realized and there are still many roads that are badly damaged. This shows that there is no gap between the proposals of the local government and the realization of development in the field. **Objective:** This study aims to analyze and describe the role of local political actors in the development of road infrastructure in Rokan Hulu Regency, as well as to identify the supporting and inhibiting factors of this role. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Informants are selected using purposive sampling and accidental sampling techniques. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the role of local political actors in the development of road infrastructure has not been running optimally. Of the five dimensions of Horoepoetri & Santosa's (1993) role theory, only two dimensions function well, namely strategy (as seen from the coordination carried out 12 times) and communication tools (use of media by local political actors in conveying community aspirations). While the other three dimensions have not been running effectively, namely policy (budget priorities are not aligned), resolution (regional conflicts still exist), and therapy (there has been no measurement of community satisfaction). Supporting factors for the development path include budget support, central policies, sector collaboration, and political commitment. However, there are obstacles such as natural conditions, technical limitations, boundary conflicts, and minimal community participation. **Conclusion:** Local political actors have a strategic role in road development in Rokan Hulu Regency, but this role has not been carried out optimally. Structural and cultural obstacles are challenges in optimizing this role. There is a need to strengthen synergy between stakeholders, policy transparency, and community involvement in every stage of development. **Suggestion:** Local governments and local political actors are expected to be able to strengthen cross-sector coordination, clarify infrastructure policy priorities, and increase community participation as an effort to accelerate road infrastructure development, especially in realizing national road status.

**Keywords:** Local Political Actors, Road Development, Infrastructure, Public Policy

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, mengingat belum terealisasinya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan masih banyaknya jalan yang rusak berat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara usulan pemerintah daerah dan realisasi pembangunan di lapangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari peran tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara optimal. Dari lima dimensi teori peran Horoepoetri & Santosa (1993), hanya dua dimensi yang berfungsi baik, yaitu strategi (terlihat dari koordinasi yang dilakukan sebanyak 12 kali) dan alat komunikasi (penggunaan media oleh aktor politik lokal dalam menanggapi aspirasi masyarakat). Sedangkan tiga dimensi lainnya belum berjalan efektif, yaitu kebijakan (tidak selarasnya prioritas anggaran), penyelesaian sengketa (masih adanya konflik wilayah), dan terapi (belum ada pengukuran kepuasan masyarakat). Faktor pendukung pembangunan jalan meliputi dukungan anggaran, kebijakan pusat, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik. Namun terdapat hambatan seperti kondisi alam, keterbatasan teknis, konflik batas wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat. **Kesimpulan:** Aktor politik lokal memiliki peran strategis dalam pembangunan jalan di Kabupaten Rokan Hulu, namun peran ini belum dijalankan secara maksimal. Hambatan struktural dan kultural menjadi tantangan dalam mengoptimalkan peran tersebut. Diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, transparansi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. **Saran:** Pemerintah daerah dan aktor politik lokal diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas prioritas kebijakan infrastruktur, serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya akselerasi pembangunan infrastruktur jalan, terutama dalam mendorong realisasi status jalan nasional.

**Kata Kunci:** Aktor Politik Lokal, Pembangunan Jalan, Infrastruktur, Kebijakan Publik

### I. Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup perubahan struktur sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu pilar utama pembangunan adalah infrastruktur jalan, karena berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah (Mahmud, 2020). Jalan yang baik tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Litman, 2019). Di Kabupaten Rokan Hulu, kondisi infrastruktur jalan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya kerusakan jalan yang cukup tinggi, serta belum terealisasinya perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, meskipun telah diajukan sejak tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas PUPR (Rahman

et al., 2022). Kegagalan ini menunjukkan lemahnya peran aktor politik lokal dalam melakukan advokasi dan pengambilan keputusan strategis terkait pembangunan infrastruktur jalan. Peran aktor politik dalam proses pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek formal struktural, melainkan juga bagaimana mereka menggunakan pengaruh politik untuk menyusun kebijakan, mengalokasikan anggaran, dan mendorong implementasi proyek pembangunan (Budiardjo, 2007). Dalam teori peran aktor oleh Horoepoetri & Santosa (1993), dijelaskan bahwa aktor politik berfungsi dalam lima dimensi: kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian konflik, dan terapi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua dimensi ini dijalankan secara optimal oleh aktor politik di daerah.

Selain menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi, infrastruktur jalan juga mencerminkan kapasitas institusional suatu daerah dalam mengelola kebijakan publik secara efektif. Di tingkat lokal, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan—terutama dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur—sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aktor politik dan birokrasi teknis. Dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, rendahnya realisasi perubahan status jalan menunjukkan lemahnya implementasi tata kelola yang berorientasi hasil. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun politik yang tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga dengan kapasitas koordinasi dan representasi kepentingan daerah.

Menurut Labolo (2020), pembangunan daerah tidak cukup hanya bergantung pada sumber daya keuangan, melainkan juga ditentukan oleh political will dan strategi advokasi kebijakan yang dilakukan oleh aktor politik lokal. Budiardjo (2020) berpendapat bahwa Aktor politik yang memiliki pemahaman terhadap struktur perencanaan nasional dan mampu menjalin kolaborasi lintas sektor lebih berpeluang untuk merealisasikan program pembangunan strategis, seperti pembangunan jalan nasional. Namun, dalam praktiknya, disparitas informasi, rendahnya partisipasi publik, dan lemahnya kapabilitas administratif masih menjadi tantangan utama bagi daerah seperti Rokan Hulu

Sejalan dengan itu, berbagai literatur internasional menunjukkan bahwa investasi infrastruktur hanya akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan jika didukung oleh kerangka institusional yang kuat dan keterlibatan aktor politik yang akuntabel (Estache & Garsous, 2012). Selain itu, penelitian oleh Ansar et al. (2016) menegaskan bahwa kegagalan proyek infrastruktur sering kali bukan disebabkan oleh kekurangan dana, melainkan oleh overoptimisme politik dan lemahnya pengawasan selama proses pelaksanaan. Dalam konteks negara berkembang, peran politik lokal sangat menentukan efektivitas investasi publik, terutama di sektor jalan raya yang memiliki pengaruh langsung terhadap produktivitas ekonomi (Melecky & Raddatz, 2015).

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan di daerah bukan sekadar isu teknis atau administratif, melainkan menjadi bagian dari dinamika politik yang kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan kebijakan yang bersifat integratif, kolaboratif, dan berbasis bukti menjadi kebutuhan mendesak bagi daerah-daerah yang tengah berjuang untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penguatan peran aktor politik lokal.

Menurut Wolfsfeld (2015), aktor politik adalah individu atau kelompok yang memiliki otoritas dalam masyarakat dan memengaruhi kebijakan serta distribusi sumber daya. Di tingkat lokal, mereka dapat berupa bupati, DPRD, atau kepala dinas, yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan pembangunan jalan. Namun, peran mereka sering terhambat oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian prioritas anggaran (Suradinata, 2020), lemahnya koordinasi antarinstansi (Risnawan, 2017), serta konflik batas wilayah dan minimnya partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, infrastruktur jalan tidak semata-mata dilihat sebagai proyek teknis, melainkan sebagai produk dari proses politik dan kebijakan publik (Jakob et al., 2017). Pembangunan jalan dapat digunakan sebagai alat untuk membangun legitimasi politik maupun meningkatkan popularitas aktor politik lokal, terutama menjelang pemilu (Puspawati et al., 2016). Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum, peran politik dalam pembangunan harus diarahkan untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan pembangunan (Aisyah & Si, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran aktor politik lokal secara menyeluruh dalam pembangunan infrastruktur jalan, serta hambatan dan faktor pendukungnya, agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan merata di Kabupaten Rokan Hulu.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian mengenai pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan, mulai dari perspektif teknis, ekonomi, hingga kebijakan. Namun, sebagian besar studi yang ada lebih menekankan pada aspek teknokratis seperti anggaran, perencanaan, dan pelaksanaan proyek fisik. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di tingkat kabupaten, khususnya dalam konteks kegagalan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai pengaruh aktor politik terhadap kebijakan publik (Jakob et al., 2017). Namun, belum ada yang secara eksplisit mengulas dimensi peran politik lokal dalam konteks infrastruktur jalan secara mikro di wilayah Rokan Hulu. Padahal, dinamika politik lokal sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam mengakses dukungan pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Selain itu, meskipun Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah beberapa kali mengusulkan perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional sejak 2019, realisasi dari usulan tersebut hingga kini belum terwujud.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan merujuk pada penelitian yang telah ada, peneliti dapat memperoleh referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai pembandingan untuk mengidentifikasi adanya kebaruan (novelty), baik dari aspek tema, metode, maupun konteks penelitian.

Arya Pangestu Ramadhani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Peran Aktor Politik Lokal Menguatkan Civil Society di Kabupaten Kotawaringin Barat*” meneliti tentang bagaimana aktor politik lokal berperan dalam penguatan masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dan bertujuan untuk mengetahui strategi aktor politik dalam meningkatkan

partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menjadi relevan karena menyoroti aspek peran dan keterlibatan aktor lokal dalam dinamika kebijakan di daerah, meskipun tidak fokus pada isu infrastruktur. Kemudian, Achmad Nur Fauzi dkk (2024) melakukan penelitian berjudul “*Analisis Peran Aktor dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City*”. Penelitian ini menggambarkan bagaimana keterlibatan aktor dalam proses formulasi kebijakan kota pintar di Semarang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan teori elite dan menjelaskan keterhubungan antar-aktor dalam pembuatan kebijakan berbasis teknologi. Persamaannya terletak pada fokus analisis terhadap peran aktor dalam kebijakan publik, namun berbeda dari sisi sektor dan objek kajiannya.

Hotrun Siregar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Aktor dan Isu Dalam Proses Pengambilan Keputusan*” menggunakan pendekatan kualitatif dan teori elitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran elite politik sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan publik. Penelitian ini penting untuk menekankan betapa dominannya peran dan kepentingan aktor dalam menentukan arah kebijakan di level daerah maupun nasional. Selanjutnya, Juni Melifiza Khairani Hasibuan (2023) dalam jurnal berjudul “*Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat: Suatu Analisis Politik*” menelaah secara kualitatif hubungan antara pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat. Kajian ini menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan keadilan distribusi hasil pembangunan. Penelitian ini sejalan dengan topik yang diangkat peneliti karena menyoroti infrastruktur sebagai alat pencapaian kesejahteraan.

Gilang Reno Prakoso dkk (2020) dalam jurnal “*Analisa Stakeholder dalam Kebijakan Pembangunan Indonesia*” memfokuskan kajiannya pada peran dan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses kebijakan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori stakeholder. Relevansinya terletak pada pemetaan peran aktor dalam pembangunan, yang juga menjadi inti dalam skripsi ini. Kemudian, Ni Wayan Puspawati dkk (2016) menulis jurnal berjudul “*Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung*”. Penelitian ini menggunakan teori rasional choice dan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur sering dijadikan alat politik, khususnya menjelang pemilu. Penelitian ini sangat relevan karena mengangkat isu infrastruktur dalam konteks strategi politik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu.

Secara umum, seluruh penelitian di atas memberikan kontribusi konseptual dalam memahami peran aktor politik dalam kebijakan pembangunan. Namun, tidak ada satu pun yang secara spesifik mengkaji kegagalan atau ketidakefektifan aktor politik lokal dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan, terutama dalam konteks usulan peningkatan status jalan dari provinsi ke nasional di Kabupaten Rokan Hulu. Inilah yang menjadi landasan kebaruan (novelty) penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam konteks studi kebijakan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya yang berkaitan dengan peran aktor politik lokal. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik menelusuri peran aktor politik lokal dalam proses pengusulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan

nasional di Kabupaten Rokan Hulu, sebuah isu yang selama ini belum banyak dibahas secara mendalam dalam kajian akademik.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas peran aktor politik dalam konteks formulasi kebijakan umum, partisipasi politik masyarakat, atau dampak pembangunan secara makro, penelitian ini justru menyediakan analisis mikro berbasis lima dimensi teori peran kebijakan Horoepoetri & Santosa (1993), yang meliputi kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Pendekatan ini jarang digunakan secara menyeluruh dalam penelitian-penelitian sejenis. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan studi di wilayah Riau, khususnya Kabupaten Rokan Hulu, mengenai bagaimana dinamika kekuasaan politik lokal memengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur jalan. Dengan menempatkan aktor politik sebagai subjek analisis utama, penelitian ini menyajikan potret empiris mengenai tantangan koordinasi, keterbatasan regulatif, dan hambatan sumber daya manusia dalam proses advokasi pembangunan jalan, yang belum menjadi sorotan utama dalam studi-studi terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam memperluas pemahaman mengenai kompleksitas hubungan antara politik lokal dan pembangunan infrastruktur, serta memberikan dasar rekomendasi bagi perbaikan kebijakan pembangunan jalan di daerah berbasis tata kelola politik yang lebih strategis dan kolaboratif.

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial dan politik secara kontekstual, serta mengungkap makna di balik tindakan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, konsep “peran” dioperasionalkan berdasarkan teori Horoepoetri dan Santosa (1993) yang membagi peran ke dalam lima dimensi, yakni peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, peran sebagai alat komunikasi, peran dalam penyelesaian sengketa, dan peran sebagai terapi. Kelima dimensi tersebut digunakan sebagai acuan dalam menganalisis bagaimana aktor politik lokal seperti kepala daerah, DPRD, serta dinas teknis menjalankan fungsi dan perannya dalam proses pembangunan jalan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan peran dan posisi mereka dalam kebijakan pembangunan jalan. Informan berasal dari kalangan pejabat pemerintah daerah, anggota legislatif, tokoh masyarakat, serta pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, seperti dokumen

perencanaan pembangunan daerah, notulen rapat, berita daring, serta surat resmi pengajuan status jalan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi langsung di lokasi pembangunan jalan, wawancara semi-terstruktur kepada informan kunci, serta dokumentasi dari berbagai sumber tertulis. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Simangunsong (2017) dalam Buku Metodologi Penelitian Pemerintahan bahwa Reduksi data dilakukan dengan cara memilah data penting sesuai fokus penelitian, lalu disajikan dalam bentuk narasi, kutipan wawancara, dan tabel analisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk menemukan pola peran aktor politik dan hambatan yang mereka hadapi dalam pembangunan infrastruktur jalan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu karena daerah ini memiliki permasalahan signifikan dalam hal infrastruktur jalan, terutama terkait usulan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional yang belum terealisasi sejak tahun 2019.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu masih belum berjalan secara optimal. Hal ini dianalisis melalui lima dimensi peran menurut teori Horoepoetri & Santosa (1993), yaitu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Dalam dimensi kebijakan, ditemukan bahwa aktor politik lokal belum mampu mengarahkan kebijakan secara efektif karena adanya ketidaksesuaian prioritas anggaran. Anggaran pembangunan infrastruktur jalan kerap kali tidak menjadi fokus utama, sehingga pelaksanaannya berjalan lambat dan kurang maksimal. Sementara pada dimensi strategi, peran aktor politik dinilai cukup baik, terbukti dengan dilakukannya setidaknya dua belas kali koordinasi lintas sektor antara eksekutif dan legislatif guna membahas peningkatan status jalan dan percepatan pembangunan.

##### **. 1. Dimensi Kebijakan**

Dalam dimensi kebijakan, aktor politik lokal seharusnya memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan strategis yang mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Namun, dalam konteks Kabupaten Rokan Hulu, peran ini belum berjalan secara maksimal. Terjadi ketidaksesuaian antara arah kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait prioritas anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan tidak menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah, dan sering kali dialihkan untuk sektor-sektor lain. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan strategis dan kurangnya sensitivitas aktor politik terhadap urgensi perbaikan dan pembangunan jalan, yang sebenarnya sangat krusial bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

##### **2. Dimensi Strategi**

Pada dimensi strategi, aktor politik lokal dinilai memiliki peran yang cukup baik. Terdapat setidaknya dua belas kali kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama

DPRD dan stakeholder terkait untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur jalan. Strategi yang dilakukan berupa musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum lintas sektor, dan pengajuan proposal peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional. Koordinasi ini menunjukkan adanya upaya konkret dari aktor politik lokal dalam menyusun langkah-langkah strategis guna menindaklanjuti berbagai persoalan infrastruktur jalan. Namun demikian, meskipun strategi telah disusun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan, baik dari sisi teknis maupun administratif.

### **3. Dimensi Alat Komunikasi**

Dalam dimensi alat komunikasi, aktor politik lokal telah menjalankan perannya dengan cukup baik. Mereka aktif dalam menjangkau dan merespon aspirasi masyarakat melalui berbagai media komunikasi, seperti forum dialog pembangunan, reses DPRD, serta pemanfaatan media sosial. Melalui kanal komunikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan rusak, permintaan perbaikan, maupun aspirasi terkait pemerataan pembangunan infrastruktur. Selain itu, aktor politik juga memberikan informasi kepada publik mengenai rencana pembangunan dan realisasi anggaran secara transparan, yang menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Peran ini memperlihatkan bahwa komunikasi yang efektif menjadi jembatan antara pengambil kebijakan dan masyarakat.

### **4. Dimensi Penyelesaian Sengketa**

Peran aktor politik lokal dalam dimensi penyelesaian sengketa masih tergolong lemah. Dalam konteks pembangunan jalan, beberapa konflik seperti sengketa batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar belum terselesaikan secara tuntas. Konflik ini berdampak langsung terhadap proses pembangunan infrastruktur karena menyangkut kejelasan status wilayah yang menjadi lokasi proyek. Selain itu, penolakan dari sebagian masyarakat terhadap proyek pembangunan yang melewati wilayahnya juga menjadi penghambat, dan belum ditangani secara proaktif oleh aktor politik. Kelemahan dalam menyelesaikan konflik ini menunjukkan belum optimalnya peran mediasi dan negosiasi yang seharusnya dilakukan oleh aktor politik lokal untuk menjembatani berbagai kepentingan.

### **5. Dimensi Terapi**

Dalam dimensi terapi, peran aktor politik lokal tampaknya belum terlihat secara signifikan. Terapi dalam konteks ini mencakup upaya untuk merespon kondisi psikologis dan kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur. Hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat pengukuran resmi dari pemerintah daerah terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan jalan yang telah dilakukan. Padahal, pengukuran ini penting untuk menilai efektivitas pembangunan serta menentukan langkah perbaikan ke depan. Ketidakhadiran mekanisme evaluasi dari sisi pengguna jalan (masyarakat) menunjukkan kurangnya pendekatan humanistik dari aktor politik dalam memahami dampak kebijakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **3.2.Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Peran Aktor Politik Lokal dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Rokan Hulu**

#### **1. Faktor Penghambat Peran Aktor Politik Lokal dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Rokan Hulu**

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang dilakukan oleh aktor politik lokal, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu. Faktor-faktor ini bersifat struktural, teknis, alamiah, dan sosial-politik, yang memengaruhi baik proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

##### **1. Kondisi Alam dan Geografis**

Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah geografis yang cukup menantang. Faktor alam seperti curah hujan tinggi, tanah labil, serta bencana banjir dan longsor kerap kali merusak infrastruktur jalan yang telah dibangun. Kondisi ini menyebabkan cepatnya kerusakan jalan dan memerlukan biaya pemeliharaan tambahan yang tidak sedikit. Gambar banjir dan kerusakan jalan akibat bencana dalam skripsi juga menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur tidak hanya terjadi karena kesalahan teknis, tetapi juga karena kerentanan lingkungan geografis wilayah tersebut.

##### **2. Keterbatasan Alat dan Tenaga Teknis**

Salah satu penghambat signifikan adalah terbatasnya sumber daya teknis, seperti alat berat dan tenaga ahli di bidang pembangunan jalan. Hal ini berdampak pada lamanya proses pengerjaan dan ketidakmampuan untuk merespons cepat terhadap perbaikan atau pembangunan jalan baru. Beberapa wilayah di Kabupaten Rokan Hulu sulit dijangkau, sehingga distribusi alat berat menjadi kendala tersendiri.

##### **3. Konflik Batas Wilayah**

Terdapat sengketa batas wilayah antara Kabupaten Rokan Hulu dan kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Kampar. Konflik ini menimbulkan ketidakjelasan status administratif dan kepemilikan wilayah, yang akhirnya menghambat proses pembangunan jalan di kawasan perbatasan. Konflik tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh pemerintah daerah, dan ketidaktegasan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarwilayah serta minimnya peran mediasi dari aktor politik.

##### **4. Minimnya Partisipasi dan Pelibatan Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan masih sangat terbatas. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat konsultasi publik atau forum evaluatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Akibatnya, kebijakan yang diambil cenderung bersifat top-down dan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ketika masyarakat tidak dilibatkan, kepercayaan terhadap pemerintah menurun, yang berdampak pada munculnya resistensi atau bahkan penolakan terhadap proyek pembangunan tertentu.

## 5. Hambatan Koordinasi dan Birokrasi

Meski telah dilakukan berbagai upaya koordinasi, namun sistem birokrasi yang lamban dan tumpang tindih antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sering menjadi penghalang. Beberapa pengajuan peningkatan status jalan dari provinsi menjadi nasional, yang telah dilakukan sejak 2019, belum terealisasi hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses administratif di tingkat pusat tidak selalu responsif terhadap usulan dari pemerintah daerah. Minimnya political leverage dari aktor lokal juga menyebabkan lemahnya daya tawar dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.

## 2. Faktor Pendukung Peran Bawaslu dalam meningkatkan Netralitas ASN menghadapi Pilkada Kabupaten Pandeglang 2024

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu juga mendapat dukungan dari berbagai aspek yang mendorong peran aktor politik lokal agar dapat berjalan lebih efektif. Faktor-faktor pendukung ini berasal dari lingkungan internal pemerintahan daerah, kebijakan nasional, serta sinergi antara berbagai elemen terkait. Berikut penjabaran masing-masing faktor pendukung:

### 1. Dukungan Anggaran

Salah satu faktor utama yang mendukung pembangunan jalan adalah tersedianya alokasi anggaran, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler di bidang infrastruktur jalan. Adanya anggaran ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan masih menjadi prioritas dalam skala tertentu di Kabupaten Rokan Hulu. Aktor politik lokal, khususnya pihak eksekutif dan legislatif, memiliki peran dalam memperjuangkan dan menyetujui besaran anggaran ini, baik melalui pembahasan KUA-PPAS maupun saat Musrenbang.

### 2. Kebijakan Pemerintah Pusat

Kebijakan nasional dalam mendorong konektivitas antarwilayah, termasuk program pembangunan daerah tertinggal, menjadi faktor eksternal yang mendorong peran aktor politik lokal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan kebijakan strategis dalam peningkatan infrastruktur jalan, yang turut memberi peluang bagi daerah untuk mengajukan usulan pengembangan jalan nasional. Hal ini memberikan dasar hukum dan peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk mengakses dana pusat dan menjalin komunikasi lintas instansi.

### 3. Kolaborasi Lintas Sektor

Terselenggaranya berbagai bentuk koordinasi dan forum lintas sektor, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan forum dialog pembangunan infrastruktur, menjadi

wadah penting bagi sinergi antara OPD teknis, DPRD, tokoh masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya. Kolaborasi ini memperkuat legitimasi politik dari program yang dijalankan dan memperluas jejaring dukungan bagi realisasi pembangunan infrastruktur. Aktor politik lokal memainkan peran dalam membangun sinergi ini agar semua pihak memiliki komitmen yang sejalan.

#### 4. Komitmen Aktor Politik Lokal

Komitmen dari aktor politik lokal, terutama kepala daerah, dinas teknis seperti Dinas PUPR, serta anggota DPRD, menjadi salah satu faktor pendukung yang signifikan. Komitmen ini ditunjukkan melalui pengajuan perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional, yang telah dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Upaya tersebut mencerminkan adanya keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur politik dan administratif. Aktor politik lokal juga menunjukkan keterlibatan aktif dalam melakukan lobi politik serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek jalan yang sedang berjalan.

#### 5. Respons Positif Masyarakat

Masyarakat secara umum merespon positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan, karena mereka menyadari pentingnya jalan yang layak dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Dukungan masyarakat ini menjadi modal sosial bagi aktor politik lokal untuk terus memperjuangkan pembangunan jalan, sekaligus menambah kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketika masyarakat memberikan apresiasi, hal ini juga memperkuat posisi politik aktor lokal dan mendorong mereka untuk meningkatkan performa dan akuntabilitas.

### 3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu berjalan secara parsial dan belum optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa dari lima dimensi peran menurut teori Horoepoetri & Santosa (1993)—yaitu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi—hanya dua dimensi yang berfungsi cukup baik, yaitu strategi dan alat komunikasi. Sementara itu, dimensi kebijakan, penyelesaian sengketa, dan terapi menunjukkan kelemahan signifikan dalam pelaksanaan peran aktor politik. Aktor politik lokal mampu menjalankan strategi pembangunan melalui koordinasi lintas sektor dan forum Musrenbang sebanyak dua belas kali, serta aktif menjalin komunikasi publik melalui media sosial dan forum reses DPRD. Namun demikian, lemahnya pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan anggaran, belum tuntasnya konflik batas wilayah, dan tidak adanya pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan jalan menandakan bahwa peran aktor politik dalam dimensi lain masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan fokus khusus pada pembangunan infrastruktur jalan di daerah yang mengajukan peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Hal ini berbeda dengan temuan dari penelitian Ni Wayan Puspawati, dkk (2016) yang lebih menyoroti strategi politik dalam konteks pemenangan pemilu melalui pembangunan

infrastruktur di Nusa Penida. Dalam penelitian tersebut, pembangunan dilakukan sebagai bagian dari strategi elektoral, sementara penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas peran politik lokal terhadap pemenuhan kebutuhan dasar wilayah, tanpa berfokus pada motif elektoral. Selain itu, jika dibandingkan dengan penelitian Gilang Reno Prakoso dkk (2020) yang membahas analisis stakeholder dalam kebijakan pembangunan nasional, penelitian ini lebih mengerucut pada konteks lokal (Kabupaten Rokan Hulu) dengan menilai peran politik secara fungsional berdasarkan dimensi peran kebijakan. Sementara Gilang Reno menyoroti kepentingan dan kekuasaan pemangku kepentingan, penelitian ini menunjukkan bagaimana kesenjangan antara koordinasi politik dan realisasi teknis menjadi penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Penelitian ini juga memberikan pembaruan dibandingkan penelitian Juni Melifiza Khairani Hasibuan (2023) yang menyoroti dampak infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat secara umum. Penelitian ini justru menggali lebih dalam mengenai bagaimana aktor politik lokal berperan sebagai pengambil kebijakan dan fasilitator pembangunan, dan bagaimana mereka merespons tantangan-tantangan di lapangan seperti keterbatasan anggaran, konflik wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Kendala utama yang dihadapi dalam penelitian ini serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Hotrun Siregar (2018) mengenai kompleksitas aktor dan isu dalam proses pengambilan kebijakan, yakni lemahnya sinergi antarpihak, dominasi politik tertentu, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan teknis. Hal ini terlihat jelas dalam ketidakmampuan aktor politik lokal Rokan Hulu untuk mempercepat proses perubahan status jalan, meskipun upaya lobi dan pengajuan telah dilakukan sejak 2019.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi aktual pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, tetapi juga menawarkan kontribusi teoritis dan praktis mengenai pentingnya peningkatan kapasitas politik lokal. Rekomendasi strategis yang ditawarkan meliputi: perbaikan perencanaan kebijakan berbasis kebutuhan riil masyarakat, penyelesaian konflik wilayah secara partisipatif, serta pelibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan untuk meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas. Temuan ini memperkuat gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada efektivitas peran politik lokal dalam menyusun, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan secara inklusif dan kolaboratif.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya optimal. Peran tersebut dianalisis melalui lima dimensi berdasarkan teori Horoepoetri & Santosa (1993), yaitu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Pada dimensi strategi, aktor politik lokal dinilai cukup aktif melalui berbagai koordinasi lintas sektor, termasuk pengajuan perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, dalam dimensi alat komunikasi, aktor politik lokal juga menunjukkan peran yang baik dengan memanfaatkan media sosial, forum reses, dan dialog publik untuk menyampaikan informasi serta menjangkau aspirasi masyarakat.

Namun, peran pada dimensi kebijakan belum maksimal karena terjadi ketidaksesuaian dalam alokasi prioritas anggaran, sehingga kebutuhan akan pembangunan jalan belum terakomodasi secara memadai dalam perencanaan daerah. Dimensi penyelesaian sengketa juga masih lemah, sebagaimana terlihat dari konflik batas wilayah yang belum tuntas dan berdampak langsung pada terhambatnya pelaksanaan proyek jalan. Selanjutnya, pada dimensi terapi, belum terdapat upaya konkret dari aktor politik lokal dalam mengukur kepuasan masyarakat atau mengevaluasi dampak pembangunan secara psikologis dan sosial, yang menunjukkan minimnya pendekatan humanistik dalam perencanaan pembangunan. Dalam proses pembangunan infrastruktur jalan tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain: tersedianya dukungan anggaran pusat dan daerah, kolaborasi lintas sektor yang efektif, kebijakan pemerintah pusat yang mendorong konektivitas wilayah, serta komitmen aktor politik lokal dalam memperjuangkan peningkatan status jalan. Di sisi lain, faktor penghambat yang signifikan juga ditemukan, seperti kondisi alam yang rentan bencana, keterbatasan alat dan tenaga teknis, konflik batas wilayah, birokrasi yang lambat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan sangat bergantung pada sinergi antara aktor politik lokal, masyarakat, dan instansi teknis. Diperlukan peningkatan kapasitas politik, perencanaan berbasis kebutuhan riil, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, Lokasi, dan biaya penelitian sehingga belum mampu menjangkau seluruh informan yang dibutuhkan. Penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (futurework).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan mengungkapkan peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2009-2019, dan Kepala Bappeda beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyukkseskan selama pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R., & Si, M. 2019. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Tangerang Selatan. Universitas Terbuka. <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=40649>
- Risnawan, W. (2017). Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik. *Dinamika Administrasi Publik*, 4(3), 511–518. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1952/1588>

- Budiardjo, Miriam. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. <https://sudimaratabanan.desa.id/desa/upload/media/upload%20buku%209092022/Dasar-Dasar%20Ilmu%20Politik.pdf>
- Horoepoetri, Arimbi & Santosa. 1993. *Peran dan Kebijakan dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Walhi. [https://lib.unika.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=22153&keywords=](https://lib.unika.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22153&keywords=)
- Ansar, A., Flyvbjerg, B., Budzier, A., & Lunn, D. 2016. Does infrastructure investment lead to economic growth or economic fragility? Evidence from China. *Oxford Review of Economic Policy*, 32(3), 360–390. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grw022>
- Wolfsfeld, Gadi. 2015. *Making Sense of Media and Politics: Five Principles in Political Communication*. New York: Routledge. <https://www.routledge.com/Making-Sense-of-Media-and-Politics/Wolfsfeld/p/book/9781138026014>
- Estache, A., & Garsous, G. 2012. The impact of infrastructure on growth in developing countries. *EIB Papers*, 17(1), 32–55. <https://www.econstor.eu/handle/10419/88378>
- Melecky, M., & Raddatz, C. 2015. Fiscal fragility in developing countries: The impact of infrastructure shocks. *World Bank Economic Review*, 29(1), 117–144. <https://doi.org/10.1093/wber/lhu003>
- Litman, Todd. 2019. *Evaluating Transportation Economic Development Impacts*. Victoria: Victoria Transport Policy Institute. [https://www.vtpi.org/econ\\_dev.pdf](https://www.vtpi.org/econ_dev.pdf)
- Mahmud, F. L. (2020). Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik (Studi Kasus Kebijakan Permukiman Di Provinsi Dki Jakarta). *Journal of Politic and Government Studies*, 9(02), 231–240. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/27319>
- Jakob, M., Flachsland, C., Steckel, J. C., & Urpelainen, J. (2017). Actors, objective, context: A political economy framework of energy and climate policy applied to india, indonesia, and vietnam. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214629620303509>
- Labolo, Muhadam. 2015. *Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia, Bogor. ISBN 9789794507018
- Simangunsong. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan : Teoritik- Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suradinata, E. (2020). *Etika Pemerintahan dan Geopolitik Indonesia*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Puspawati, Ni Wayan, dkk. 2016. *Strategi Aktor Politik Baru dalam Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung*. Denpasar: Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/42251?articlesBySameAuthorPage=7>

